

**TINJAUAN MENURUT FATWA DSN (DEWAN SYARIAH
NASIONAL) TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN JASA
PEMBERSIHAN MAKAM**
(Studi Kasus di TPU PRACIMALOYO, Desa Makamhaji, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh
DAMARJATI KURNIAWAN
I000130001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN MENURUT FATWA DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)
TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN JASA PEMBERSIH MAKAM (Studi Kasus
di TPU PRACIMANTORO, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DAMARJATI KURNIAWAN
I000130001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.
NIDN. 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN MENURUT FATWA DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)
TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN JASA PEMBERSIH MAKAM (Studi Kasus
di TPU PRACIMANTORO, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah)**

**OLEH
DAMARJATI KURNIAWAN
I000130001**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. M. Muinudinillah Basri, MA
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Harun, M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,


(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Oktober 2019

Penulis,



DAMARJATI KURNIAWAN

I000130001

**TINJAUAN MENURUT FATWA DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)
TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN JASA PEMBERSIHAN MAKAM (Studi
Kasus di TPU PRACIMALOYO, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)**

Abstrak

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa dalam batas tertentu dengan pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Praktek ijarah di TPU Pracimaloyo yang peneliti mulanya beranggapan belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan tidak layak sistem pemberian upah kepada para pembersih makam di TPU tersebut, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap hal tersebut berdasarkan kajian teori fatwa DSN. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjabaran yang detail dan jelas mengenai praktek ijarah di TPU Pracimaloyo apakah telah sesuai dengan fatwa DSN atau tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Sehingga para pengelola makam yang diberi amanah dari keluarga pemilik makam dapat mengetahui apakah praktek ijarah yang dilakukan terhadap para pembersih makam di TPU Pracimaloyo telah sesuai fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) NO: 09/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data penelitian skripsi ini diambil dari wawancara, gambar/foto, analisis dokumen, dan observasi. Setelah data terkumpul peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori fatwa DSN karangan yang ditulis oleh DSN-MUI. Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisis data berdasarkan teori fatwa DSN MUI maka peneliti menyimpulkan bahwa praktek ijarah yang dilakukan di TPU Pracimaloyo telah sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan dari fatwa DSN MUI namun disayangkan jumlah upah yang diterima oleh pembersih makam belum layak untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Kata kunci: akad ijarah, upah buruh pembersih makam, fatwa dsn

Abstract

Ijarah is a contract to transfer the right to use or benefit of goods / services within a certain limit with payment of wages (rent) without the transfer of ownership followed. The practice of ijarah in Pracimaloyo TPU, which researchers initially thought was not in accordance with the provisions of the DSN fatwa (National Sharia Council) NO: 09 / DSN-MUI / IV / 2000 and was not feasible for a wage-giving system for tomb cleaners in the TPU, so that researchers were interested in conducting research based on this study based on DSN fatwa theory. This study aims to obtain a detailed and clear description of the practice of ijarah in TPU Pracimaloyo whether it is in accordance with the DSN fatwa or not in accordance with the fatwa. So that the tomb managers who were given the mandate from the family of the tomb owners can find out whether the practice of ijarah carried out on the tomb cleaners at Pracimaloyo TPU is in accordance with the DSN fatwa (National Sharia Council) NO: 09 / DSN-MUI / IV / 2000. This research uses descriptive method, which is a research procedure that uses descriptive data in the form of written or oral words from people and actors that can be observed. This thesis research data is taken from interviews, pictures / photos, document analysis, and observation. After the data is collected, the researcher analyzes it using the

DSN fatwa theory written by DSN-MUI. After the researcher conducted the research and analyzed the data based on the DSN MUI fatwa theory, the researchers concluded that the practice of *ijarah* conducted at the Pracimaloyo TPU was in accordance with the terms, harmony and provisions of the fatwa of the MUI DSN but unfortunately the amount of wages received by the tomb cleaners was not yet adequate to meet their needs .

Keywords: akad *ijarah*, wage for tomb cleaning workers, dsn fatwa

1. PENDAHULUAN

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *Ilahiyat*, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhlukat), yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya (Suhendi, 2007).

Pandangan dalam Islam, fiqh muamalah juga sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam upaya perekayasaan fiqh muamalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.

Ijarah dalam arti bahasanya adalah sewa, upah, jasa atau imbalan. Menurut istilah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa dalam batas tertentu dengan pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika nilai upah yang ditawarkan kepada pembersih makam akankah si pembersih makam cukup buat hidupnya (Hasan, 2003).

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya perbolehan transaksi upah jasa dalam memenuhi kebutuhan akad ini pula yang disebut dengan *ijarah*, dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* yakni bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang ia nikmati. Manfaat itu sendiri bukan pada bendanya, benda bukanlah obyek akad ini, Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, meskipun akad ijarah kadang-kadang mengaggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat, bukan hanya akad ijarah itu terjadi pada manfaat suatu benda, tetapi akad ijarah bisa juga di samakan maknanya dengan upah- mengupah dalam masyarakat.

Pembersih kuburan di tempat pemakaman umum (TPU) praciwaloyo terletak desa makamhaji, sangat memberikan kontribusi atas jasanya, hal ini memberikan nilai sosial yang sangat tinggi serta adanya peranan sistem ekonomi yang bertujuan kelangsungan hidup bagi masyarakat. Para masyarakat yang di berikan amanah dalam menjaga pemakaman juga memiliki peran penting, karena faktor ekonomi yang lemah dan lapangan kerja yang kurang, maka masyarakat memanfaatkan TPU Pracimaloyo terletak desa Makamhaji sebagai pekerjaan yang mengandalkan jasa tanpa harus mengeluarkan modal.

Untuk mengetahui secara mendalam, pada proposal skripsi ini, penulis tertarik untuk mengambil judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa pembersihan makam menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) (Studi Kasus TPU Pracimaloyo Terletak Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah upah jasa pembersih makam TPU Pracimaloyo di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah sesuai menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)?

Penelitian ini bertujuan mengetahui upah jasa pembersih makam di TPU Pracimaloyo menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) terletak di desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang upah jasa pembersihan makam di TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan

mengenai upah jasa pembersihan makam yang diterima oleh petugas kebersihan TPU Pracimaloyo tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penentuan skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan petugas pembersih makam dan keluarga pemilik makam di TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis seperti catatan, buku, transkrip, majalah, notulen, dokumen, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 1989). Data-data tersebut masih aktual dan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu data petugas pembersih makam TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi kondisi geografis, jumlah petugas pembersih makam TPU Pracimaloyo.

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis (Adi, 2004). Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap keteraturan penerimaan upah kepada petugas pembersih makam.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Menurut Fatwa Dsn (Dewan Syariah Nasional) Terhadap Upah Jasa Pembersihan Makam yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem upah pembersih makam Pracimaloyo. Tujuannya dilihat menurut Fatwa Dsn (Dewan Syariah Nasional), yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta pemahaman mengenai sistem upah yang diberikan kepada pembersih makam Pracimaloyo dalam tinjauan Fatwa Dsn (Dewan Syariah Nasional).

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan cara metode deduktif, yaitu metode analisa dengan cara mengambil data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan sistem upah pembersih makam di TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Upah Petugas Pembersih Makam di TPU Pracimaloyo

Sejumlah data yang berhasil penulis peroleh dari proses wawancara langsung kepada para responden, dan sebagaimana telah dijabarkan di bab sebelumnya mengenai sistem upah petugas pembersih makam di TPU Pracimaloyo, akan peneliti analisis secara sistematis dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam peneliti ini dapat diterima secara ringan dan mudah.

Aspek yang sensitif didalam hubungan kerja salah satunya adalah upah. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Upah merupakan sumber penghasilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Upah memegang peranan penting dan merupakan suatu ciri khas hubungan kerja dan tujuan utama dari pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hukum islam pemberian upah, sewa, jasa, imbalan disebut dengan ijarah. Ijarah merupakan bagian dari hukum perdata. Yang dimaksud dengan pemberian upah merupakan hukum perdata adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan imbalan atau upah yang bersumber dari donatur tetap (pihak yang memberikan kisaran nominal dana kepada pengelola TPU Pracimaloyo secara rutin tiap bulannya).

Pengupahan merupakan suatu bentuk hak oleh seorang pekerja/buruh yang dapat diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari apa yang telah dikerjakan, kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/ buruh, demikian yang disebutkan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) no 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mengenai kebijakannya sendiri diatur didalam PPRI NO 78 Tahun 2015 Pasal 1.

Berdasarkan kebijakan pemberian upah diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan di TPU Pracimoloyo menggunakan penghitungan upah minimum berdasarkan pemberian donator pemilik makam sendiri. Dari data diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengupahan di TPU Pracimoloyo memang belum memiliki peraturan yang baku mengenai pemberian upah setiap bulannya. Namun secara garis besar dapat tampak terlihat kisaran upah yang diterima oleh setiap buruh berbeda berdasarkan lama atau waktu mereka bekerja.

Menurut PPRI no 78 tahun 2015 pasal 12 mengenai penetapan upah, upah ditentukan berdasarkan satuan waktu dan hasil. Di sini peneliti berpendapat bahwa pemberan upah memang berdasarkan waktu mereka bekerja dan seberapa banyak tempat yang mampu mereka bersihkan atau biasa mereka bersihkan. Sehingga sangatlah mungkin jika upah antara para buruh tidaklah sama. Walaupun demikian bukan menjadi sebuah keirian bagi para buruh tidak seperti sistem pemberian upah para pekerja atau buruh di sebuah pabrik atau perusahaan mereka memukul rata pemberian upah di setiap para pekerjanya.

Walaupun terkadang mereka juga masih mendapat tambahan upah dari para pengunjung makam yang kisaran setiap buruh tidak sama. Memang ada yang beruntung dengan pemberian uang serelanya lumayan ada yang sama sekali tidak mendapat. Tapi hal itu merupakan kebahagiaan sendiri yang dirasakan oleh setiap buruh disana. Namun yang perlu dititikberatkan adalah meskipun mereka tidak mendapat uang sukarela dari para pengunjung yang mungkin kadangkalanya berziarah kemakam mereka akan tetap mendapatkan upah bulanan dari para donator tetap dari keluarga pemilik makam.

Mengenai cara pembayaran upah kepada para pekerja pihak makan akan mengupulkan para buruh kemudian akan memberikan angklop yang berisi upah yang akan mereka terima. Didalamnya hanya berisi kisaran uang tanpa ada ada cara penghitungan upah yang mereka peroleh.

3.2 Analisis Tinjauan Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

3.2.1 Dua Orang yang Bertransaksi (Mu'jir dan Musta'jir)

Orang yang bertransaksi disini bukan penjual dengan pembeli layaknya yang terjadi dalam perdagangan, Namun disini adalah orang yang memberikan upah dan menerima upah. Pemberi upah atau dalam bahasa lain Mu'ajir dan penerima

upah atau pihak yang melakukan jasa pembersih makam dengan bahasa lain disebut Musta'jir.

Pemberi upah (Mu'jir) disini adalah keluarga pemilik makam, kerabat pemilik makam, saudara pemilik makam atau orang yang di beri mandat untuk pemberian dana pembersih makam oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadapnya.

Penerima upah/gaji (Musta'jir) adalah para pembersih makam disini adalah para petugas pembersih makam yang semuanya adalah wanita paruh baya dan ada pula yang telah lansia. Mereka sebenarnya merupakan para pekerja sampingan dan tambahan saja, namun ada pula usia lansia, beliau adalah salah satu orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, oleh karenanya mereka harus bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya sendiri.

Disini setiap musta'jir menerima upah setiap bulan dengan kisaran upah 300.000 dari pihak pengelola makam. Para pemberi dana tetap makam biasanya memberikan uang untuk membersihkan makam kepada pihak pengelola makam, baru kemudian para pengelola makam menyalurkan kepada para pembersih makam. Kadangkalanya para pembersih makam memperoleh uang sukarela dari para pengunjung yang datang ke makam. Mengenai jumlah nominalnya memang tak bisa di prediksi, namun hal tersebut sering mereka dapatkan. Apalagi untuk hari – hari tertentu seperti hari – hari besar keagamaan, sudah pasti menjadi momen yang paling ditunggu oleh mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan uang namun ada juga keluarga makam yang memberikan berupa bingkisan – bingkisan barang kebutuhan pokok atau berupa snack- snack kecil atau kue- kue kecil untuk lebaran.

Dengan upah yang mereka peroleh sebenarnya bukan penghasilan utama mereka, sehingga mereka merasa terbantu ekonominya dan sebagai tambahan penghasilan bagi mereka. Namun ada pula salah satu dari pembersih makam yang memang tidak memiliki pekerjaan selain dari membersihkan makam, beliau sudah sangat renta umurnya dengan kisaran 60 tahunan.

Mereka menganggap membersihkan makam bukan saja pekerjaan namun juga sebagai kebaikan hati mereka untuk merawat makam tersebut. Mereka tak melihat berapa kisaran gaji yang mereka akan peroleh, tapi mungkin

lebih ingin ikut menjaga dan merawat keadaan makam, walau memang keadaan ekonomi mereka belumlah dikatakan layak, namun kebaikan hati mereka yang mau melakukan hal tersebut dengan upah yang mungkin bagi sebagian orang menganggap tak seberapa tersebut, namun cobalah liat dari selain segi finansial, tapi lebih pada jasa yang telah lakukan terhadap sesama.

Dalam hal ini jelaslah bahwa syarat yang pertama mengenai syarat dan rukun ijarah, yaitu ada orang yang memberi upah/ gaji atau Mu'ajir serta adanya orang yang menerima gaji/upah atas jasa yang telah ia lakukan atau Musta'jir.

3.2.2 Shighat ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir :

Shighat ijab Kabul dalam hal ini adalah sebuah transaksi antara Mu'ajir/ orang yang bertugas memberi upah dan Mustajir/orang yang menerima upah. Keduanya melakukan transaksi sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Mustajir, transaksi tersebut dalam bentuk pemberian uang secara langsung kepada mereka. Mengenai jumlah serta nominalnya memanglah tidak menjadi hal yang utama dalam hal ini. Karena sebagian besar para pembersih makam tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan bukanlah pekerjaan utama mereka. Walaupun memang ada beberapa pembersih makam yang berusia lansia, mereka tak sanggup lagi untuk bekerja, sehingga hanya sebagai pembersih makam saja sebagai pekerjaannya. Mengenai syarat dari Shighat ijab Kabul sendiri adalah sebagai berikut: berakal, kehendak sendiri, baligh, mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan agar tidak terjadi salah paham, serta mengetahui akad masa mengerjakan atau batasan waktu.

Baik pihak yang menjadi Mu'ajir/ pemberi upah serta bagi Mustajir/ penerima upah pada intinya haruslah memenuhi syarat diatas. Shighat ijab Kabul pada hal ini, pemberian upah pada para pembersih makam sendiri, telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pada syarat dan ketentuan diatas. baik pihak yang menerima ijarah/Muajir maupun pihak yang menerima upah sama – sama berakal, pemberian ijarah tersebut memanglah atas dasar kehendak sendiri, sebagai imbalan atas jasa yang di berikan kepada para pembersih makam, maka pihak muajir memeberikan imbalan atau upah sesuai dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak – pihak lain. Syarat berikut nya kedua belah pihak

telah baligh dan buakan lagi anak-anak numun ada yang berusia lansia, dalam hal ini telah jelas bahwa terpenuhinya Shigat Ijab Kabul.

Syarat berikutnya adalah mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diadakan agar tidak terjadi salah paham, maksudnya dalam hal ini adalah pihak Muajir/ pengelola makam TPU Pracimoloyo maupun Mustajir/pihak pembersih makam sama- sama mengetahui secara jelas dan detail apa manfaat yang didapat untuk menghindari masalah- masalah yang timbul yang dikarenakan ketidak jelasannya akhad yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Maka pentinglah keduanya untuk sama – sama mengetahui dan memahami dengan jelas manfaaat yang di dapat oleh pihak mustajir amaupun kepada pihak Muajir.

Mengenai mengetahui akad masa mengerjakan atau batasan waktu, ini juga penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak karena dengan adanya ketentuan ini pihak – pihak penerima ijarar/mustajir dapat meminta upah/ijarah berikutnya jikalau waktu yang telah sampai batas pada saat akahad itu dilakukan. Para pemebersih makam bias memberikan warning atau sedikit tuntutan kepada pengelola makam untuk menunaikan kewajiban yang seharusnya dilakukannya.

Namun untuk system pemberian ijarah/ upah kepada para pemebersih makam di TPU Pracimoloyo sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan Shigat Ijab Kabul yang sesuai dengan ketentuan diatas. Mereka telah melaksanakan tanpa di perlukan warning sebelumnya, mereak telah sadar tenang waktu atau batasan waktu yang telah di sepakati saat akhad.

3.2.3 Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

Pada hal ini, Ujrah yang diberikan pada TPU Pracimaloyo telah diketahuai oleh kedua belah pihak, baik Mu'ajir/ pemberi upah/gaji dan Mustajir/pihak yang di beri upah/gaji. Para Mu'ajir memberikan jumlah dengan nominal kisaran Rp. 300,000, 00 untuk setiap para pembersih makam. Para Mustajir / penerima gaji/upah telah mengetahui dengan nomiala tersebut, dan nominal itupun bisa berubah–ubah sesuai dengan nominal yang diberika ooleh para kerabat/ keluarga pemilik makan pada TPU Pracimaloyo tersebut.

Pihak – pihak mustajir/penerima upah tidak merasa kurang dengan jumlah nominal tersebut, yang sekiranya mungkin bagi kebanyakan orang menganggap nominal tersebut sangatlah tidak cukup. Namun bagi mereka menganggap hal tersebut bukan hanya sebagai pekerjaan yang mencari materi namun juga sebagai bentuk kepedulian terhadap hal – hal social. Mereka menganggap makam adalah sebagai tempat yang harus mereka jaga, bersihkan bukan menelantarkan atau bahkan merusak tempat tersebut. Rasa memiliki mereka jauh lebih tinggi dari pada gaji/upah yang mungkin mereka akan terima tiap bualannya. ‘Handarbeininya’ mereka sangatlah tinggi, inilah yang ciri khas orang – orang Jawa sebenarnya. Jika mereka telah mencitai suatu pekerjaan tersebut maka bukan hanya dilihat dari segi materi saja namun juga dari segi lain bagi mereka.

Pihak mustajir sendiri sebenarnya bukan hanya bekerja pada tempat itu tersebut, sehingga mungkin juga bukan hanya karena materi yang mereka cari. Itu hanya sebagai tambahan bagi mereka, maka jumlah tersebut bukanlah masalah bagi mereka. Mereka mendapat tambahan pendapat sendiri sudah bersyukur sebenarnya.

Hal tersebutlah yang membuat peneliti menganggap sebagai faktor yang membuat mereka bertahan bekerja sebagai pembersih makam pada TPU tersebut. Peneliti beranggapan dengan kisaran nominal tersebut sanggupkah mereka bertahan lama pada pekerjaan tersebut. Namun setelah mengetahui background mereka tersebut, membuat peneliti mengetahui alasan mereka tetap bertahan bekerja disana.

Disini mengenai jumlah upah telah diketahui nominal baik bagi Muajir dan Mustajir. Mereka telah sepakat dengan nominal tersebut. Yang perlu digali bawahi adalah jumlah tersebut tidak kurang dari nominal tersebut namun jika berlebih tak masalah. Yang sebenarnya mereka dapat memperoleh nominal yang berlebih pada hari – hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Mereka mendapat upah dua kali lipat dari upah biasanya mereka dapat. Selain itu mereka mendapat barang – barang lain atau sembako yang diberikan oleh para keluarga/ kerabat pemilik makam.

3.2.4 Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan

Barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Benda yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Dalam Praktiknya system penguapahan atau pemberiana ijarah kepada para pembersih makam di TPU Pracimaloyo sama – sama mengetahui jumlah yang akan diberikan selama batas waktu satu bulan sebagai imbalan atas jasa yang telah mereka kerjakan.

Mengenai syarat penggajian itu sendiri dalam fatwa DSN- MUI memiliki beberapa point, diantaranya adalah upah- pengupahan dalam hal tersebut dapat dimanfaatkan kegunaannya. Dalam hal ini para penerima upah/ mustajir dapat merasakan manfaat yang diperole atas imbalan jasa yang di peroleh, berupa uang, ada juga berupa bingkisan sembako atau yang lainnnya yang memiliki manfaat dan nilai guna bagi mereka.

Syarat berikutnya yang berakitan dengan system penguapahan adalah mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Disini telah jelas bahwa dalam pengupahan tidak ada unsur haram, karena sebagai bentuk balas jasa antara Muajir dan Mustajir. Dalam hal ini alat tukar terhadap jaspun yaitu dnegan uang atau berupa bahan sembako yang berdasarkan hukum nya mubah/diperbolehkan untuk dilakukan tidak adda unur syara' dalam system pengupahan di TPU Pracimaloyo ini.

Para mustajir mendapat sembako atau berupa hal semacam lain bukan hanya uang disaat hari besar keagamaan, seperi hari raya Idul fitri, merupakan rejeki yang luar biasa bagi mereka. Mereka bisa memperoleh barang – barang dari pihak kerabat atau keluarga pemilik makam sebagai bentuk ucapan terimakasih atas jasa yang telah mereka kerjakan. Sebenarnya bukan saja hari besar – besar keagamaan saja namun terkadang para keluarga atau kerabat

makam ada yang berkunjung ke makam untuk berziarah, juga merupakan rejeki tak terduga sendiri bagi para pembersih makam di TPU Pracimaloyo tersebut. Mereka dengan perasaan suka cita menyambut bulan Ramadhan ataupun menyambut keluarga maupun kerabat makam yang datang untuk berziarah ke sana.

Penjelasan mengenai pemberian upah menurut Fatwa DSN-MUI diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian upah/gaji memiliki rukun dan syarat serta ketentuan dari ijarah/upah/gaji yang harus dipenuhi, tidak ada kelalaian didalam melakukan sesuatu yang menyimpang dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Adapun yang terjadi pada pemberian upah/gaji pada pekerja di TPU Pracimaloyo adalah sama halnya dengan pengertian yang ada pada Fatwa DSN-MUI diatas, pihak pengelola TPU memberikan upah/gaji kepada para buruh di TPU Pracimaloyo.

Pihak pengelola TPU Pracimaloyo sangat terbantu adanya tolak ukur di dalam Fatwa DSN-MUI, dan pihak pengelola TPU Pracimaloyo telah menerapkan di dalam pemberian gaji/upah terhadap para buruhnya. Pihak pengelola telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan terpenuhinya syarat, rukun dan ketentuannya.

Sebenarnya jika dilihat dari ketentuan rukun dan syarat pemberian upah sesuai dengan fatwa DSN-MUI memang sudah terpenuhi namun jika dilihat dari segi ekonomi upah tersebut yang diterima oleh pembersih makam TPU Pracimaloyo tersebut belumlah layak karena jumlah nominalnya masih sangat dibawah standar upah jasa.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di TPU Pracimaloyo, Jl. Slamet Riyadi No. 361, Dusun IV, Makam haji, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang pemberian upah pekerja di TPU disana, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemberian upah kepada para buruh di TPU Pracimaloyo telah sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan sesuai dengan Fatwa DSN –MUI.

Pemberian gaji/upah kepada para pekerja atau pembersih makam dilakukan pada awal bulan kepada setiap buruh pada TPU Pracimaloyo, mereka memperoleh upah dari pengelola makam tersebut yang mendapat donatur tetap dari para keluarga pemilik makam, kemudian mereka menyalurkan uang tersebut kepada para buruh dan sebagian digunakan untuk memperbaiki bangunan – bangunan makan yang dirasa perlu diperbaiki.

Pihak pengelola makam mengkoordinir dana pemasukan dengan pengeluaran sehingga mampu seimbang tanpa mengurangi hak - hak buruh pembersih makam untuk mendapatkan haknya yang berupa gaji/upah untuk mereka. Sehingga para buruh merasa senang bekerja disana karena mendapatkan penghasilan sebagai tambahan masukan mereka, karena hampir seluruh buruh pekerja tersebut merupakan usia – usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan mereka memasuki usia- usia lansia. Sebenarnya pihak – pihak makam juga memperkerjaannya mereka dengan alasan supaya mereka tidak terlantar di usianya rentanya.

Praktek ijarah yang diberlakukan oleh pengelola makam TPU Pracimaloyo telah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MU, pihak pengeloala telah memberikan hak para buruh pembersih makam tiap bulannya. Sehingga tidak ada pihak -pihak yang dirugikan dalam hal ini. Baik para buruh pada makam maupun pengelola makam sama– sama telah melaksanakan kewajiban-kewajiban serta terpenuhinya hak-hak di dalamnya.

4.2 Saran

Dari uraian kesimpulan analisis yang telah peneliti paparkan, perlu kiranya peneliti memberikan saran-saran serta pertimbangan sebagai masukan untuk pihak - pihak diantaranya:

Bagi para pengelola pembersih makam semoga dapat terus melanjutkan praktik pemberian ijarah atau upah yang sesuai dan patut kepada para buruh pembersih makam tanpa mengurangi ataupun melakukan kecurangan lain yang dapat merugikan pihak lain yang bersangkutan.

Bagi para keluarga pemilik makam yang berstatus sebagai donatur tetap terhadap TPU Pracimoloyo diharapkan dapat terus memberikan donasi dan sumbangan terhadap TPU tersebut, sehingga bagi pengelola TPU tersebut dapat menjalankan pemberian gaji/upah kepada petugas kebersihan dan mengadakan perbaikan – perbaikan yang dirasa perlu terhadap TPU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: Hikmah.
- Arikunto, Suharsimi. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- DSN-MUI. (2000). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Nomor 09 Tahun 2000*.
- Hasan, Ali. Dkk. (2003). *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Peraturan Pemerintah RI No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.